

SKRIPSI

ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (Studi Kasus KPNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

SUCI LITA PUTRI
NPM. 155111166

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Khairuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SUCI LITA PUTRI
NPM : 155111166
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1
PEMBIMBING I : Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si
PEMBIMBING II : Drs. H. Armis., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Peranan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan Anggota Di Kota Buittinggi (Studi Kasus KPNRI Kementerian Agama Di Kota Bukittinggi)

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I



(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)

PEMBIMBING II


(Drs. H. Armis., M.Si)

MENGETAHUI :

DEKAN


(Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA)

KETUA JURUSAN


(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No 113 Perhentian Marpyan

Telp : (0761)674681 Fax : (0761) 674834

Pekanbaru 28284

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

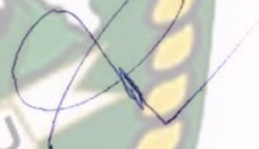
NAMA : SUCI LITA PUTRI
NPM : 155111166
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI
JUDUL : ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (Studi Kasus PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih, M.Si

PEMBIMBING II

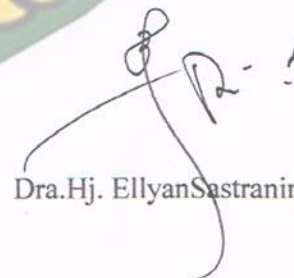

Drs. H. Armis, M.Si

Mengetahui :

DEKAN


Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

KETUA JURUSAN


Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : SUCI LITA PUTRI

NPM : 155111166

JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

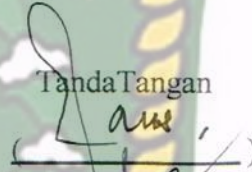
JUDUL : ANALISIS PERANANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS KPNRI KEMENTRIAN AGAMA DI KOTA BUKITTINGGI)

Team Penguji

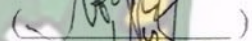
Nama

Tanda Tangan

1. Drs. M Nur, MM

()

2. Hj. Nawarti Bustamam, SE. M. Si

()

3. Sinta Yulyanti, SE., M. Ec

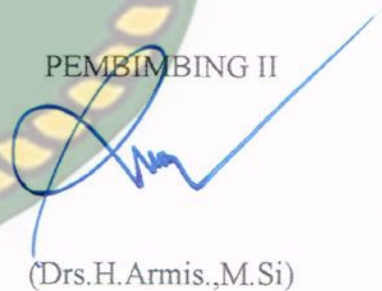
()

Di Setujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

()
(Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih.,M.Si)

()
(Drs.H.Armis.,M.Si)

KETUA JURUSAN

EKONOMI PEMBANGUNAN


()
(Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih.,M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SUCI LITA PUTRI
 NPM : 155111166
 FAKULTAS : EKONOMI
 JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
 JUDUL : ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS KPNRI KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA BUKITTINGGI)

No	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	12-02-18	X		Analisis Pembahasan Untuk Rumusan Masalah Ke 2	<i>[Signature]</i>
2	17-10-18	X		Tambahkan Kuesioner Penelitian	<i>[Signature]</i>
3	19-10-18	X		Acc Lanjut ke Pembimbing II	<i>[Signature]</i>
4	20-10-2018		X	Bahan	<i>[Signature]</i>
5	22-10-2018		X	Revisi	
6	25-10-2018		X	Acc Seminar Proposal	
7	11-02-19	X		Bab V Hasil di Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
10	13-02-2019	X		Sempurnakan Analisis Bab V	<i>[Signature]</i>
11	14-01-2019	X		Tambahan Interpretasi Untu Hasil Perhitungan di Bab V	<i>[Signature]</i>
12	15-02-2019	X		Acc Pembimbing II Acc Ujian Seminar Hasil	<i>[Signature]</i>
13	15-02-2019		X	Revisi	<i>[Signature]</i>
14	16-02-2019		X	Perbaiki Sesuai Saran	
15	17-02-2019		X	Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru, 29 Maret 2019
 Wakil Dekan I


 Dr. Firdaus A.R.S.E., M.Si., Ak.CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

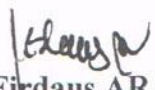
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1730/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 27 Maret 2019, Maka pada Hari Kamis 28 Maret 2019 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Ekonomi Pembangunan** S1 Tahun Akademis 2018/2019.

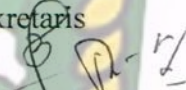
1. Nama : Suci Lita Putri
2. NPM : 155111166
.Jurusan : Ekonomi Pembangunan S1
4. Judul skripsi : Analisis Penerapan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan Anggota di Kota Bukittinggi (Studi Kasus PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)
5. Tanggal ujian : 28 Maret 2019
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang Sidang Meja Hijau Fekon UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **A- (70)**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak.CA
Wakil Dekan bid. Akademis

Sekretaris


Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
Ketua Prodi EP S1

Dosen penguji :

1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
2. Drs. H. Armis., M.Si
3. Drs. M. Nur., MM
4. Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si
5. Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev

Saksi

1. M. Irfan Rosyadi, SE., ME


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Pekanbaru 28 Maret 2019

Mengetahui
Dekan,


Drs. H. Abrar, M.Si, Ak.CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1730/Kpts/FE-UIR/2019

TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Suci Lita Putri
NPM : 155111166
Jurusan/Jenjang Pendd : Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan Anggota di Kota Bukittinggi (Studi Kasus PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Materi	Ketua
2	Drs.H. Armis, M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Drs. M. Nur, MM	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si	Lektor, C/c	Penyajian	Anggota
5	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec	Asisten Ahli, C/a	Bahasa	Anggota
6	M. Irfan Rosyadi, SE., ME	-	-	Saksi I
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Maret 2019
Dekan,

Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

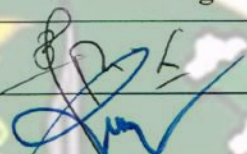

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

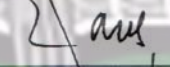
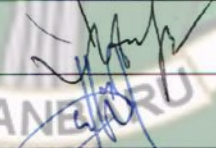
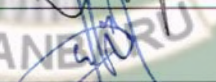
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Suci Lita Putri
NPM : 155111166
Jurusan : Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan Anggota di Kota Bukittinggi (Studi Kasus PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)
Hari/Tanggal : Kamis 28 Maret 2019
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si		
2	Drs. H. Armis., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Drs. M. Nur., MM		
2	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		
3	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev		

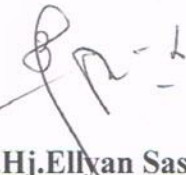
Hasil Seminar : *)

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lulus | (Total Nilai |
| <input checked="" type="radio"/> 2. Lulus dengan perbaikan | (Total Nilai <u>23/3 = 71</u>) |
| 3. Tidak Lulus | (Total Nilai |

Mengetahui
An.Dekan

Pekanbaru, 28 Maret 2019
Ketua Prodi


Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
Wakil Dekan I


Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih,M.Si

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Suci Lita Putri
 NPM : 155111166
 Judul Proposal : Analisis Peranan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan Anggota di Kota Bukittinggi (Studi Kasus KPNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi)
 Pembimbing : 1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si
 2. Drs. H. Armis., M.Si
 Hari/Tanggal Seminar : Sabtu 24 November 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si		1.
2.	Drs. H. Armis., M.Si		2.
3.	Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si		3.
4.	Drs. M. Nur., MM		4.
5.	Sinta Yulyanti, SE., M.Ec., Dev		5.
6.	M. Irfan Rosyadi, SE., ME		6.

Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 An.Dekan bidang Akademis

Dr.Firdaus AR,SE,M.Si.Ak.CA

Pekanbaru, 24 November 2018
 Sekretaris,

Dra.Hj.Ellyan Sastraningsih,M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 775 /Kpts/FE-UIR/2018

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1

Bismillahirrohmanirrohim

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang:
1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Ekonomi Pembangunan Tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

- Mengingat :
1. Surat Mendikbud RI:
 - a. Nomor: 0880/U/1997
 - b. Nomor: 0213/0/1987
 - c. Nomor: 0378/U/1986
 - d. Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 - a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 - b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 - a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan penyusunan :
1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
2	Drs. H. Armis, M.Si	Lektor, C/c	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
N a m a : Suci Lita Putri
N P M : 155111166
Jurusan/Jenjang Pended.: Ekonomi Pembangunan / S1
Judul Skripsi : Analisis Peranan Koperasi PNRI Terhadap Kesejahteraan anggota di Kota Bukittinggi (Studi Kasus KPNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi).
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.



Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 12 September 2018

Dekan

Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS KPNRI KEMENTRIAN AGAMA DI KOTA BUKITTINGGI)

Oleh : Suci Lita Putri

(Dibawah bimbingan : Pembimbing I : Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,M.Si
Pembimbing II : Drs.H.Arnis,M.Si)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan anggotanya dan untuk mengetahui peranan Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini dilakukan di Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi dengan populasi 323 orang yang dijadikan sampel sebanyak 39 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan menggunakan kuisisioner. Hasil penelitian ini bahwa Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi memiliki peran terhadap peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan adanya pinjaman yang diberikan sehingga anggota dapat meningkatkan usaha sampingannya, selain itu anggota koperasi mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) per tahunnya. Dan Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci : Koperasi, Kesejahteraan Anggota

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PNRI COOPERATIVE ROLE ON THE WELFARE OF MEMBERS IN BUKITTINGGI CITY (CASE STUDY OF THE KPNRI KEMENTRIAN RELIGIOUS IN BUKITTINGGI CITY)

By: Suci Lita Putri

(Under guidance: Supervisor I: Dra. Hj. EllyanSastraningsih, M.Si Advisor II: Drs.H.Armis, M.Sc)

This research was conducted with the aim of finding out the role of the PNRI Cooperative Ministry of Religion in the City of Bukittinggi in increasing the income of its members and to find out the role of the PNRI Cooperative in the Ministry of Religion in the City of Bukittinggi in improving the welfare of its members. This research was conducted at the PNRI Cooperative Ministry of Religion in the City of Bukittinggi with a population of 323 people who were sampled as many as 39 people. Data sources used are primary data and secondary data. The method or data analysis technique used in this study is descriptive using questionnaires. The results of this study that the PNRI Cooperative Ministry of Religion in the City of Bukittinggi has a role in increasing the income of Cooperative members with the loan provided so that members can increase their side business, besides the cooperative members get Remaining Business Results (SHU) per year. And the PNRI Cooperative Ministry of Religion in the City of Bukittinggi has a role in improving welfare.

Keywords: Cooperatives, Member Welfare

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam kurikulum Universitas Islam Riau (UIR), sebagai salah satu syarat untuk melengkapi dan memperoleh gelar sarjana pada program S-1. Skripsi ini yang berjudul : "ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (Studi Kasus KPNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mengiringi, mengajari, membimbing, mendo'akan, memberikan semangat, yang mendorong penulis selama penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs.Abrar,M.Si,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih,M.Si selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan serta

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ibu.

5. Bapak Drs.H.Armis,M.Si Pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak.
6. Segenap Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang sangat membantu terselesainya skripsi ini.
7. Bapak DRS.H.M. Harmen selaku Ketua Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi beserta seluruh jajaran dan stafnya yang telah memberikan bantuan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran penelitian ini.
8. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Haituna Hatta dan Mama Elyzarti tercinta yang sangat saya sayangi dan cintai sepanjang hari. Kepada saudara serahim Halferis Lita Putra, Fitriia Dina Hatta, Ferdi Lita Putra, Dini Lita Putri dan keponakan tunggal Algino Friscy Ramadhan yang selalu mendoakan, memberikan pengorbanan, perhatian dan motivasi yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan studi selama ini.
9. Terimakasih yang setulusnya kepada Uda Rino Kurniawan yang selalu tabah dan senang hati menemani sampai terselesainya skripsi ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

10. Terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan Ekonomi Pembangunan 15B yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini.
11. Terimakasih untuk Keluarga HIMEP terkhusus untuk Rizky Dwi Yara Cahyadi, Puput Novriani, Willy Dio Prakoso, Khairul Fikri Adi, Ayu Tuttuman, Yuliana Martasari, Fitri Yeni, Fitri Mardiani, Zalnah Ayati, Mutia Dwi Andriani, Hermanto, Asep Nopandra, Nurul Fajri, Enggar Sejati dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doanya, semangat untuk kebersamaan kita selama ini.
12. Spesial untuk anak BANYAK CITO Yillzy Burnandes SE, Herlyana Gustia SE, Nur Fajri SE, Adul Aziz SE, Syahbeni Putra Zen SE, Syafrudin Darwis SE, Firdzan Alfandi SE, Muhammad Arafah SE, Rico Yohanes Batubara SE yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan selama kita bersama dan memberi semangat serta motivasi yang luar biasa sehingga selesainya skripsi ini.
13. Terima kasih kepada kedua orang tua di Pekanbaru Ante Retna Jelita dan Om Irnaldi yang sudah memberikan fasilitas yang nyaman dan semangat untuk terus berjuang membahagiakan Mama dan Papa dikampung dan juga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan, materi dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun menuju perbaikan ke arah kemajuan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 24 Januari 2019

Penulis

SUCI LITA PUTRI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistemetika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	14
2.1.1. Pengertian Koperasi.....	14
2.1.2. Karakteristik Koperasi.....	15
2.1.3. Jenis-jenis Koperasi.....	15
2.1.4. Tujuan Koperasi.....	18
2.1.5. Prinsip Koperasi.....	19
2.1.6. Modal Koperasi.....	19
2.1.7. Teori Pendapatan.....	21
2.1.8. Teori Kesejahteraan.....	24
2.1.9. Komponen Kesejahteraan.....	25
2.1.10. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan.....	26

2.1.11. Teori Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	
Anggotanya	26
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3 Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	31
3.3 Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Analisa Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian	35
4.1.1 Keadaan Demografi Bukittinggi	36
4.2 Gambaran Umum	36
4.2.1 Sejarah Berdirinya Koperasi	36
4.2.2 Struktur Organisasi Koperasi	37
4.2.3 Pengurus	39
4.2.4 Pengawas	40
4.2.5 Penasehat Koperasi	41
4.2.6 Modal Koperasi	41
4.2.7 Sisa Hasil Usaha	42
4.2.8 Sanksi	43

4.2.9 Pembubaran Koperasi	44
---------------------------------	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi	46
5.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Umur	46
5.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
5.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
5.1.4 Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga	49
5.1.5 Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Anggota Koperasi.	50
5.2 Peranan Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Koperasi	51
5.3 Peranan Koperasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi	56
5.4 Pembahasan	57

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	59
6.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1.1 : Perembangan Jumlah Anggota Koperasi, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, serta Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Kemenag Bukittinggi Tahun 2012-2017	3
4.1 : Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Tahun 2018 Berdasarkan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bukittinggi	36
4.2 : Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi PNRI Kementerian Agama di Bukittinggi	43
5.1 : Responden Berdasarkan Tingkat Umur	47
5.2 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
5.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
5.4 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
5.5 : Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Anggota Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi	51
5.6 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2012	52
5.7 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2013	52
5.8 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2014	53
5.9 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2015	54
5.10 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2016	54
5.11 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2017	54
5.12 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Tahun 2012-2017	55

55.13 : Rata-Rata SHU Yang Diterima Responden Perorangan Koperasi
Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2016.....56



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semenjak zaman kemerdekaan selalu dilandaskan pada asas demokrasi dimana masyarakat ikut berpartisipasi. Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain BUMN, BUMS dan Ekspor-Import (Tulus Tambunan, 2001). Di antara empat pelaku ekonomi tersebut, badan usaha koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan isi yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Dahulu bangsa kita terkenal dengan perkoperasiannya. Menurut Muhammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) koperasi adalah lembaga ekonomi yang sangat cocok di Indonesia karena sifat masyarakat yang kekeluargaan. Beliau adalah tokoh yang dikenal sejak dahulu dan dianggap sebagai bapak koperasi. Koperasi dikenal di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1906. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Karena zaman dahulu banyak warga masyarakat yang meminjam uang pada rentenir.

Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu

mendirikan koperasi *kumiyai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastic dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, melalui perjuangan yang cukup panjang pada tahun 1927 keluar peraturan tentang “Perkumpulan Koperasi Bumi Putera” No. 91 tahun 1927. Melalui peraturan tersebut maka izin mendirikan koperasi di pelonggar. Kongres koperasi pertama diselenggarakan atas dorongan Bung Hatta pada tanggal 12 juli 1947 di Tasikmalaya. Keputusan penting dalam kongres I antara lain:

1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.
2. Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.
3. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Pada bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusan penting dalam kongres tersebut adalah:

1. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
2. SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Pada bulan September 1956 diadakan Kongres Koperasi ke III di Jakarta keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi.
2. Menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian.

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Kemudian hari tersebut

ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Undang-undang perkoperasian yang dipakai sampai saat ini adalah UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992.

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Meskipun koperasi adalah perkumpulan orang-orang, tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya.

Selain itu, koperasi juga bukan perkumpulan modal yang usahanya berlandaskan pada tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya seperti firma, perusahaan perseorangan, ataupun perseroan terbatas karena prinsip dari koperasi adalah mengutamakan pelayanan dan kebutuhan para anggotanya. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. Hal ini sesuai dengan asas koperasi yakni koperasi adalah milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri.

Salah satu tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya. Kata kesejahteraan mengandung arti luas, bersifat relatif, dan lebih mencerminkan makna makro. Sedangkan, yang diperlukan adalah operasionalisasi tujuan makro tersebut kedalam tujuan mikro koperasi. Sejalan dengan pengertian bahwa koperasi adalah badan usaha atau perusahaan, maka pengertian kesejahteraan

yang menjadi tujuan koperasi lebih menjurus kepada pengertian ekonomi. Kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang dapat dioperasionalkan untuk meningkatkan pendapatan anggota.

Pendapatan yang diterima oleh anggota koperasi dapat berupa pendapatan nominal (Uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggotanya. Sebagai contoh dalam koperasi produsen, yang berarti anggota sebagai produsen produk tertentu, yang menjalankan usaha atau bisnisnya membutuhkan pelayanan dari koperasi dalam bentuk penyediaan input produksi, penyediaan kredit, dan atau pemasaran output yang dihasilkan. Tujuan koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Dengan kata lain meningkatkan pendapatan nominal anggotanya, yang disebut sebagai Promosi Ekonomi Anggota.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

2. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen, yaitu koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

Koperasi harus berjalan efisien atau produktif, sebagai perusahaan atau badan usaha yang dianggap bersaing dengan berbagai pasar. Koperasi harus efisien atau efektif bagi para anggotanya, artinya menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup bagi anggota dan setiap anggota akan menilai bahwa manfaat yang diperoleh karena partisipasi dalam usaha bersama atau bekerjasama itu merupakan kontribusi yang lebih efektif dalam mencapai kepentingan dan tujuan-tujuannya sendiri daripada hasil yang diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh bisa dijadikan tolak ukur dalam taraf kesejahteraan setiap anggota koperasi.

Latihan atau pendidikan terhadap anggota koperasi juga perlu diadakan agar mereka lebih memahami arti berkoperasi serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi, sehingga tidak ada persepsi bahwa menjadi anggota koperasi hanya untuk dapat pinjam uang di koperasi. Dengan demikian, anggota koperasi dapat mengerti, bahwa yang menentukan arah jalannya koperasi

adalah anggota. Anggota dapat menyarankan dan memutuskan secara bersama dengan melalui musyawarah dalam Rapat Anggota.

Koperasi memiliki kedudukan dan fungsi yang penting yang secara bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta untuk melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut. Adapun peran dan tugas koperasi yaitu:
 1. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
 2. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
 3. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.
 4. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

5. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
6. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai di sebuah departemen/kantor/instansi pemerintah yang memiliki pendapatan tetap dan relatif rendah. KPNRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup pegawai negeri. Selain untuk mensejahterakan pegawai negeri, KPNRI didirikan untuk mensukseskan program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UKM. KPNRI juga bisa dijadikan sebagai suatu wadah bagi Pegawai Negeri yang ingin mengembangkan potensi kewirausahaan yang mereka miliki. Dengan adanya KPNRI diharapkan dapat membantu pegawai negeri dalam meningkatkan taraf hidup pegawai negeri baik berupa kredit pinjaman modal, kredit konsumsi, tabungan dan sebagainya.

Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPNRI) Kementerian Agama Bukittinggi merupakan salah satu KPNRI yang ada di Bukittinggi. KPNRI Kementerian Agama Bukittinggi merupakan suatu koperasi yang cukup besar. Dengan dijalankannya KPNRI di Kementerian Agama Bukittinggi diharapkan dapat membantu perekonomian anggota Koperasi Pegawai Negeri Kementerian Agama Bukittinggi itu sendiri. Perkembangan usaha simpan pinjam dari tahun 2012 sampai tahun 2017 telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, serta Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Kementrian Agama Bukittinggi Tahun 2012-2017.

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (RP)	Sisa Hasil Usaha (Rp)
2012	343	34.300.000	10.086.118.865	125.933.921
2013	333	33.300.000	10.870.545.794	216.135.579
2014	328	32.800.000	13.368.428.533	239.409.536
2015	336	33.600.000	14.169.597.241	530.334.556
2016	333	33.300.000	17.981.408.333	451.577.897
2017	323	32.300.000	17.699.804.998	760.827.583

Sumber : Koperasi KPNRI Kemenag Bukittinggi, 2018

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota Koperasi Pegawai Negeri Kementrian Agama Bukittinggi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dari uraian diatas dapat diketahui keanggotaan Koperasi Pegawai Negeri Kementrian Agama Bukittinggi dari tahun 2012-2014 mengalami penurunan dan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan dari tahun 2016 dan 2017 dari jumlah anggotanya sedangkan simpanan wajibnya mengalami kenaikan serta simpanan pokoknya mengalami penurunan dan sisa hasil usahanya juga mengalami kenaikan. Sistem pembagian SHU sudah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Koperasi PNRI Pasal 32-33 yaitu :

Pasal 32 :

1. Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan buku yang bersangkutan, termasuk pajak.

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi dibagi sebagai berikut:
 - a. 25 % untuk cadangan
 - b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.
 - c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanan.
 - d. 5 % untuk dana pendidikan
 - e. 10 % untuk dana Pengurus dan Badan Pengawas
 - f. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai
 - g. 5 % untuk dana pembangunan
 - h. 5 % untuk dana sosial

Pasal 33 :

1. Cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal, dan untuk menutup kerugian koperasi yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian pengurus.
2. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% jumlah cadangan untuk keperluan perluasan usaha koperasi.
3. Sekurang-kurangnya 25% dari umlah cadangan harus disimpan pada Bank yang disetujui oleh Rapat Anggota

Paparan diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya kedudukan dan peranan koperasi khususnya pada Koperasi Pegawai Negeri Kementerian Agama Bukittinggi didalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Akan tetapi seberapa besarnya peranan koperasi tersebut khususnya Koperasi Kementerian Agama Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi masih

menjadi pertanyaan besar bagi penulis, demikian pula dengan berapa besar peranan anggota koperasi untuk ikut dalam berpartisipasi dalam perkoperasian.

Dari analisa diatas maka penulis mencoba untuk mengadakan penelitian dengan judul :“ANALISIS PERANAN KOPERASI PNRI TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS KPNRI KEMENTRIAN AGAMA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan anggotanya?
2. Bagaimana peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan anggotanya.
2. Untuk mengetahui peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. Bahan informasi bagi pihak pemerintah serta instansi yang terkait khususnya Dinas Koperasi dan UKM dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya bidang perkoperasian.
2. Bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama maupun dalam bidang lain yang berhubungan.
3. Sarana aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis yang diperoleh dibidang pendidikan pada prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi tulisan nantinya, maka dibagi dalam VI bab, dimana tiap-tiap bab nya akan dibagi dalam sub-sub dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Bab Tinjauan Pustaka membahas teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Teori dan konsep yang dimuat dalam berbagai jurnal yang kredibel

serta beberapa dokumen hasil seminar, buku, karya ilmiah lain yang relevan akan melengkapi kajian pustaka penelitian bab ini. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, akan dapat dibuat kerangka penelitian yang menjadi dasar penyusunan kuesioner dan wawancara.

BAB III METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab Metode Penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan tentang gambaran umum Koperasi di KPRI Kementrian Agama Bukittinggi yang berisikan tentang sejarah singkat berdirinya Koperasi di KPRI Kementrian Agama Bukittinggi, Struktur Organisasi dan Kegiatan Usaha Koperasi.

BAB V HASIL DAN PEMAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian tentang Peranan Koperasi PNRI terhadap Kesejahteraan Anggota di Bukittinggi

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan apa saja yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *co* yang artinya sama-sama, dan *operation* yang berarti bekerja atau bertindak. Secara harfiah koperasi berarti bekerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang dimaksud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula (Baswir, 2000).

Definisi koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012 adalah sebagai “Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Margono Djojohadikoesomo yang dikutip Hendrojogi memberikan definisi koperasi, yaitu perkumpulan manusia, seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha ekonomi rakyat yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi yang bekerja

sama dalam bidang ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip persamaan, kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

2.1.2. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own orientied firm*). Dan koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Koperasi dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

2.1.3. Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Dalam pasal 16 UU No.26 Tahun 1992 menjelaskan:

1. Berdasarkan bidang usaha koperasi dibedakan menjadi :
 - a. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan, sandang, dan barang pembantu keperluan sehari-hari. Koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas

yang baik dan harga yang layak. Koperasi konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan disamping pelayanan untuk anggota, koperasi konsumsi juga boleh melayani umum.

b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Sesuai peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi utama ialah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya :

1. Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin.
2. Koperasi Perkebunan, anggotanya produksi perkebunan rakyat.
3. Koperasi Produksi Peternakan, anggotanya para peternakan.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk mendirikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Ada beberapa koperasi jasa antara lain :

- 1) Koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang.
- 2) Koperasi perumahan memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.
- 3) Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran.

e. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya :

- 1) Koperasi Pemasaran Ternak Sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
- 2) Koperasi Pemasaran Elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.

3) Koperasi Pemasaran Alat-alat Tulis Kantor, anggotanya adalah perdagangan barang-barang alat tulis kantor atau sekolah.

2. Berdasarkan daerah kerja, koperasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Koperasi Primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b. Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemutusan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu.
- c. Koperasi induk, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

2.1.4. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan dan dikembangkan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Namun demikian tujuan pengembangan koperasi di Indonesia terlihat lebih spesifik sebagai mana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat tiga pihak yang berkepentingan atas tercapainya tujuan koperasi anggota, masyarakat dan pemerintah (Hudiyanto, 2002 : 79).

2.1.5 Prinsip Koperasi

Tata kehidupan dalam organisasi mengatur bagaimana hubungan antara anggota dan pengurus koperasi. Tata kehidupan ini secara prinsip diatur oleh prinsip-prinsip koperasi dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Pasal 6 yang memiliki 7 prinsip Koperasi Indonesia yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

2.1.6. Modal Koperasi

Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan sejumlah dana. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dalam rangka mendirikan badan usaha koperasi, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat minimum untuk mendirikan sebuah koperasi adalah jumlah

anggota pendiri. Sedangkan besar modal minimum harus disetir sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan, hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha.

Usaha koperasi dilakukan bersamaan dibangun dengan modal bersama. Sumber modal menurut UU No.12 Tahun 1967 Pasal 32, modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan-cadangan dan sumber lain. Simpanan anggota didalam koperasi terdiri atas :

1. Modal sendiri dapat berasal :

a. Simpanan Pokok

Adalah modal yang berasal dari simpanan yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota boleh dicicil atau dibayar sekaligus simpanan ini boleh diambil kembali jika keluar dari anggota.

b. Simpanan Wajib

Adalah modal yang berasal dari simpanan wajib yang dibayar terus-menerus secara teratur, baik jumlah ataupun masa pembayarannya. Biasanya simpanan wajib boleh diambil bila keluar menjadi anggota.

c. Simpanan Sukarela

Adalah simpanan berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.

2. Dana Cadangan

Adalah modal yang berasal dari sisa hasil usaha yang ditetapkan oleh anggaran dasar koperasi sebagai dana cadangan tiap-tiap satu periode pertahun.

3. Hibah

Adalah modal yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain menjadi modal sendiri.

4. Modal pinjaman dapat berasal dari Anggota, Koperasi Lain, Bank atau Lembaga lainnya dan Penerbitan Surat Obligasi dan Surat Hutang lainnya.

2.1.7. Teori Pendapatan

Pendapatan adalah hasil berupa uang atau material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atas jasa-jasa manusia (Raharja dan Manurung, 2000:44). Sedangkan menurut Sudarman (2004:81) pendapatan adalah balas jasa yang diterima oleh setiap individu atas pengorbanan faktor produksi yang mereka punya.

Berbicara mengenai pendapatan, maka pendapatan itu dapat dilihat dari ruang lingkup yang luas dikenal dengan pendapatan nasional, sedangkan dalam ruang lingkup yang sangat sempit dikenal dengan pendapatan pribadi yang diperoleh atau dibayarkan pada individu.

Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang

dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi tidak menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode.

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat (BPS dan Balitbang, 2000:35) dan (BPS 2000:33) dalam suatu survei biaya hidup merinci pembagian pendapatan dalam tiga bagian antara lain :

- a. Pendapatan berupa uang yang sifatnya reguler yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa langsung. Sumber pendapatan uang itu melalui gaji atau upah hasil usaha sendiri dari bekerja bebas, penjualan dari barang-barang yang dimiliki.
- b. Pendapatan yang berupa barang adalah segala penghasilan yang diterima dengan barang.
- c. Pendapatan yang bukan terbentuk barang maupun uang.

Pendapatan pribadi merupakan semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu Negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi

termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat dimana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbasnya.

Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan/pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik berasal dari pendapatan rumah tangga maupun pendapatan anggota rumah tangga (Junandar, 2004:147). Dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan merubah pula besarnya pengeluaran mereka yang mengkonsumsi suatu barang. Pendapatan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang (Sukirno, 2005 : 36) .

Pendapatan perseorang (*Personal Income*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*Transfer Payment*). Didalam teori ekonomi jenis pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pendapat Total (*Total Revenue/TR*)

Adalah jumlah/kualitas barang yang terjual, dikalikan dengan harga satuan. Semakin banyak yang terjual maka semakin besar penerimaan total ($TR = P \times Q$)

2. Pendapatan Rata-Rata (*Avarage Total Revenue/AR*)

Adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dijual ($AR = TR/Q$)

3. Pendapatan Marginal (*Marginal Revenue/MR*)

Adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjualan dari setiap satuan hasil produksi.

Menurut Boediono (2002:170) beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang adalah :

1. Jumlah faktor produksi yang dimiliki dari hasil produksi barang dan jasa
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dipasar faktor produksi.

Salah satu peran koperasi adalah mempertinggi taraf hidup yang didasarkan pada perekonomian yaitu penerimaan pendapatan yang adil dan merata yang diterima oleh setiap anggotanya.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya rill koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya. Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

2.1.8. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam

masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

2.1.9. Komponen Kesejahteraan

Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya karena koperasi dapat menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam koperasi. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggotanya maka koperasi tersebut harus mampu memberikan kinerja yang baik. Adapun komponen kesejahteraan menurut Sutrisno (2008:116) yaitu kepuasan, pengaruh yang menyenangkan, dan rendahnya tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan.

2.1.10. Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan menurut Sutrisno (2008:117)

yaitu :

1. Usia

Orang muda cenderung merasakan emosi yang lebih dalam dari pada orang lebih tua, tetapi orang tua lebih cenderung lebih puas dengan hidupnya.

2. Jenis Kelamin

Kaum perempuan merasakan emosi lebih dalam dari pada kaum laki-laki.

2.1.11. Teori Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III mengenai fungsi dan peran koperasi menyebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Setiadi (2003:9) mengatakan bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab moral dan sosial. Serta yang penting juga adalah mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selanjutnya, koperasi Indonesia wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri-sendiri, bertanggung jawab kepada diri-sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Selain dari teori diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Khumaidi dalam skripsinya yang berjudul “Peran koperasi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani” menunjukkan bahwa peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani ialah: 1) Penyedia modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, 2) Penyedia sarana produksi pertanian, diantaranya ialah penyediaan benih, pupuk, dan pestisida serta traktor sebagai alat bajak sawah, 3) Edukator melalui kegiatan pendidikan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan seputar pertanian dari dinas terkait dan mengadakan studi banding pada koperasi lain dan gapoktan, 4) Fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar.

Dengan adanya koperasi diharapkan taraf hidup masyarakat dapat meningkat baik dari segi perekonomian, sosial dan budaya. Segi perekonomian

diharapkan pendapatan masyarakat dapat meningkat dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan dari segi sosial diharapkan masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan untuk saling bekerjasama dengan orang lain, dan dari segi budaya yaitu diharapkan masyarakat dapat menjaga budaya nasional dengan cara melakukan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Fakta yang terjadi di masyarakat yaitu peran koperasi sebagai pengembang kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dikarenakan beberapa penyebab alasan yaitu diantaranya 1) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah disebabkan sosialisasi koperasi belum optimal, 2) Ketidak profesionalan manajemen koperasi, 3) Kurangnya dukungan modal keuangan.

Badan Pusat Statistik tahun 2015 mencatat bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia terus mengalami perkembangan. Di tahun 2011 jumlah koperasi aktif di Indonesia tercatat 133.666, tahun 2012 tercatat 139.321, tahun 2013 tercatat 143.117 sedangkan tahun 2014 jumlah koperasi aktif tercatat 147.249. Menurut data BPS 2015 dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Selain pemaparan diatas ada beberapa contoh penelitian yang membahas tentang peranan Koperasi terhadap Kesejahteraan anggota yang penulis jadikan sebagai bahan referensi antara lain :

No	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil
1	Aditiya, 2005	"Analisa Pendapatan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri"	Pada penelitian ini dapat dilihat peranan koperasi terhadap kesejahteraan anggota dengan kemajuan koperasi dalam mengembangkan sektor usaha yang dilakukan. Jumlah anggota KOPSA_UM tidak mengalami perubahan, lain halnya dengan SHU KOPS_UM mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2012-2013 yaitu sebesar Rp. 963.642.747, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat menabung di koperasi.
2	Michelle Teller, 2009	"Analisis efisiensi penggunaan modal usaha dan modal sendiri pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Riau pekanbaru"	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan tingkat efisiensi modal usaha dan modal sendiri dapat dikatakan baik walaupun pada tahun 2005 terjadi perpotongan antara modal usaha dan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan koperasi tersebut masih banyak yang bermasalah dari modal asing. Sedangkan efisiensi penggunaan modal usaha dan modal sendiri secara keseluruhan koperasi tersebut dalam keadaan efisien.
3	Agustin Ira Saputri, 2009	"Analisis Efisiensi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) di Surakarta"	Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal koperasi, biaya operasional dan jumlah pengelola. Output adalah volume usaha dan SHU. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa belum semua KPRI sampel efisien. Dari sepuluh KPRI yang mewakili KPRI

		<p>lain terdapat enam KPRI yang belum efisien yaitu: KPRI Guyub Rukun tingkat tingkat efisiensinya baru mencapai 98,8%. KPRI Setia tingkat efisiensinya baru mencapai sebesar 88%. KPRI Primkokar tingkat efisiensina baru mencapai 89,15%. KPRI Gotong Royong tingkat efisiensina baru mencapai 81,30%. KPRI Kosema tingkat efisiensinya baru mencapai 99,97%. Inefisiensi yang terjadi pada KPRI sampel dalam penelitian bersumber pada input yang digunakan (modal, biaya operasional, jumlah karyawan) dan output yang dihasilkan SHU.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Hipotesis

Secara empiris, hipotesa adalah jawaban sementara hasil pembahasan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenaran. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas maka penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan anggotanya.
2. Diduga Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu perkembangan Koperasi yang cukup pesat dari tahun ketahun dengan melakukan berbagai inovasi baru pada setiap tahunnya, mampu mengembangkan berbagai usaha, meningkatkan pendapatan serta mensejahterakan anggota koperasi.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berupa :
 - a. Indentitas pinjaman responden
 - b. Data keanggotaan responden
 - c. Data mengenai pendapatan responden
 - d. Data mengenai pendidikan responden
 - e. Penggunaan dana pinjaman usaha
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak Koperasi PNRI Kementrian Agama di Kota Bukittinggi yang mendukung dalam penelitian ini.

3.3. Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh pengurus dan anggota Koperasi yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi sebanyak 323 orang. Mengingat banyaknya jumlah anggota koperasi maka setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, maka penulis mengambil teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple Random Sampling (Husaini, 2009:44).

Besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendapat Slovin (dikutip dalam Umar, 2008:108) dengan rumus berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana : n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kesalahan pengambilan sampel yang masih

dapat di tolelir atau diinginkan, dalam hal ini 15%.

$$n = \frac{323}{1 + 323 (15\%)^2}$$

$$n = \frac{323}{1 + 323 (0,0225)}$$

$$n = \frac{323}{1 + 7,27}$$

$$n = \frac{323}{8,27}$$

$$n = 39,19903$$

Dibulatkan menjadi 39.

Teknik pengambilan sampel untuk semua kategori responden kecuali anggota koperasi adalah menggunakan simple Random Sampling sedangkan untuk katagori responden yaitu anggota koperasi menggunakan pendapat Solvin.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini kepada anggota Koperasi PNRI Kementrian Agama dengan berpedoman kepada daftar isian yang telah disusun sebelumnya.

b. Interview

Yaitu suatu metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan responden maupun pegawai Koperasi

PNRI Kementerian Agama Bukittinggi yang ada hubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti.

3.5. Analisa Data

Analisa data dibawah ini di analisis secara deskriptif dan kuantitatif untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan diatas. Analisa deskriptif yaitu penganalisa data dengan menggambarkan seluruh peristiwa dari objek penelitian dan mengaitkan dengan teori yang ada kemudian dipaparkan. Analisa kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan dengan metematik ataupun sistem statistik dan ekonometrika, adapun metode analisa data dilakukan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Peranan Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan anggota dilakukan dengan cara menghitung perkembangan Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh anggota selama 6 tahun.
- b. Untuk menganalisis peran Koperasi PNRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi menggunakan analisis secara deskriptif dengan menganalisis jawaban dari kuesioner penelitian dan jumlah Sisa Hasil Usaha yang diterima anggota dari tahun ketahun.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kota Bukittinggi adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Barat. Dua kata yang terhimpun jadi satu, mempunyai makna identik dengan letaknya pada ketinggian perbukitan. Kota ini memiliki luas 25,24 km² membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan.

Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.

4.1.1 Keadaan Demografi Kota Bukittinggi

Dalam hasil registrasi hasil penduduk di Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebanyak 126.804 jiwa dengan jumlah laki-laki 61.588 jiwa dan perempuan sebanyak 65.216.

Dalam jumlah penduduk sebanyak 126.804 jiwa tersebut dapat dilihat penyebarannya serta presentase pada masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.1: Presentase Jumlah Penduduk Kecamatan Tahun 2018 berdasarkan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
1	Guguak Panjang	6,831.0	48,752	7.137
2	Mandiingin Koto Selayan	12,156.0	48,492	3.989
3	Aur Birugo TigoBaleh	6,252.0	29,560	4728
Jumlah (Kab/Kota)		25,239,0	126,804	5024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

4.2 Gambaran Umum Koperasi PNRI Kota Bukittinggi

4.2.1 Sejarah berdirinya Koperasi PNRI di Kota Bukittinggi

Koperasi PNRI berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kotamadya Bukittinggi, Provinsi Sumatra Barat. Daerah kerja koperasi ini meliputi kantor Kementerian Agama di Bukittinggi. Koperasi ini didirikan pada tanggal 25 februari 1981 sebagaimana badan hukum No.756/BH-XVII. Adapun kepengurusan pertama dinahkodai oleh Bapak Akasyah Kari Marajo dengan jumlah anggota sebanyak 63 orang dengan simpanan pokok peranggotanya sebesar Rp.5000 dan simpanan wajib Rp.25000 peranggota setiap bulannya. Koperasi ini hanya

mempunyai satu jenis usaha yaitu Simpan Pinjam. Pada tahun 2018 kepengurusan koperasi ini diketuai oleh Bapak Drs.H.M.Harmen.

4.2.2 Struktur Organisasi Koperasi

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh koperasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian harus dituangkan dengan jelas kedalam struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan dan juga untuk menjadi kerangka dasar yang menggambarkan tugas tanggung jawab dan wewenang dari bagian-bagian yang terdapat dalam suatu organisasi.

Berdasarkan dengan struktur organisasi tersebut, maka Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi menetapkan struktur organisasi Tahun 2017-2019 sebagai berikut :

1. Pengurus
 - Ketua : DRS.H.M. Harmen
 - Wakil Ketua : DRS. Mawardi
 - Sekretaris : H. Zarkani. S.Ag
 - Bendahara : Desmiati
2. Pengawas
 - Ketua : Drs. H. Syarwan. Djas
 - Anggota : Drs. H. Djasmani AN
 - : H. Idrial S.Pd
3. Penasehat : H. Abrar Munandar, M.Ag

Untuk memberikan gambaran secara jelas, maka penulis dapat meguraikan secara singkat mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Rapat yang diselenggarakan/ dilaksanakan oleh pengurus dalam rangka mengambil suatu keputusan / kebijakan penting dan mendesak yang berkenaan dengan Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi.

2. Rapat Anggota Luar Biasa

Rapat yang diselenggarakan oleh pengurus atau pengawas untuk mengambil keputusan yang bersifat disituasi darurat seperti :

- a. Bencana alam
- b. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Dimana penyelesaiannya adalah :

- 1) Pengurus jika pengawas melakukan pelanggaran tersebut diatas.
- 2) Pengawas jika pengurus melakukan pelanggaran tersebut diatas.
- 3) Perwakilan anggota jika pengurus dan pengawas melakukan pelanggaran tersebut diatas

3. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh perwakilan anggota, pengawas dan dewan penasehat dalam rangka tutup buku.

4.2.3 Pengurus

Penguru koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota. Yang menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana
- b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang pada koperasi
- c. Telah menjadi anggota minimal 1 (satu) tahun

Sebelum melaksanakan tugas, pengurus diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota. Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. Sewaktu-waktu pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota, bilamana terbukti bahwa:

- a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi
- b. Pengurus tidak mentaati Undang Undang Koperasi serta peraturan/ketentuan pelaksanaan dalam anggaran dasar koperasi
- c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi
- d. Pengurus tidak loyal kepada koperasi dan anggota

Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali untuk jangka waktu paling lama tiga kali periode pemilihan. Bilamana salah seorang anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya akan tetapi pengangkatan tersebut harus didapatkan pengesahan oleh rapat anggota berikutnya.

Pengurus koperasi maksimal berjumlah 5 (lima) orang. Anggota pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam buku daftar pengurus. Pengurus koperasi tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

4.2.4 Pengawas

Pengawas dipilih dari oleh anggota dalam rapat anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan
- b. mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap koperasi
- c. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana
- d. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan hutang kepada koperasi

Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. Sebelum melaksanakan tugas, pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota. Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi. Pemeriksaan oleh pengawas diadakan dalam 3 (tiga) bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu. Hasil pengawasan/pemeriksaan harus dirahasiakan kepada pihak ketiga. Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju atau mundurnya perkembangan koperasi. Pengawas dapat meminta bantuan jasa dari Angkatan Publik atau Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil.

4.2.5 Penasehat Koperasi

Bagi kepentingan Koperasi PNRI Bukittinggi Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat. Rapat anggota dapat mengangkat orang bukan anggota yang mempunyai pengetahuan tentang koperasi dan keahlian dalam perusahaan koperasi untuk menjadi dewan penasehat.

Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa yang disetujui oleh rapat anggota. Anggota dewan penasehat tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan rapat pengurus. Dewan penasehat memberi saran/ajaran pada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta atau tidak.

4.2.6 Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan anggota baik bank dan lembaga keuangan lainnya serta penerbitan obligasi dan sumber lainnya yang sah. Modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Setiap anggota harus menyimpan pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp.5000. Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi berupa simpanan wajib minimal Rp.10.000 setiap bulannya. Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi berupa simpanan sukarela atau simpanan lainnya yang ketentuannya ditetapkan dalam anggaran dasar rumah tangga/peraturan khusus.

Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. Apabila keanggotaan berakhir, maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 hari kemudian setelah diperhitungkan dengan kewajiban membayar hutang-hutangnya. Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas persetujuan rapat anggota. Kebutuhan modal pinjaman diajukan atas dasar perhitungan yang matang dan menguntungkan koperasi.

4.2.7 Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya dalam tahun buku yang bersangkutan termasuk pajak. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagi sebagai berikut:

- a. 25% untuk cadangan
- b. 25% untuk anggota menurut perbandingan simpanan dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha
- c. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanan
- d. 5% untuk dana pendidikan
- e. 10% untuk dana pengurus dan badan pengawas
- f. 5% untuk dana kesejahteraan pegawai
- g. 5% untuk dana pembangunan
- h. 5% untuk dana sosialisasi.

Tabel 4.2: Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi PNRI Kementrian Agama di Bukittinggi

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)
2012	125.933.921
2013	216.135.579
2014	239.409.536
2015	530.334.556
2016	451.577.897
2017	760.827.583

Sumber: Koperasi PNRI Kemenag Bukittinggi, 2018

Cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk pemupukan modal dan untuk menutup kerugian koperasi yang timbul bukan disebabkan kesengajaan atau kelalaian pengurus. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% jumlah cadangan untuk keperluan perluasan usaha koperasi. Sekurang-kurangnya 25% dari jumlah cadangan harus disimpan pada bank yang disetujui oleh rapat anggota.

4.2.8 Sanksi

Apabila anggota pengurus, pengawas melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi ini maka:

- a. Dikenakan sanksi denda Rp.100.000 bila pengurus melanggar ketentuan yang berlaku
- b. Dikenakan sanksi dengan hukuman denda Rp.500.000 bila pengurus tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan
- c. Dikenakan sanksi hukuman denda Rp.100.000 bila pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaan

d. Dikenakan sanksi denda Rp.50.000 bila anggota tidak membayar simpanan wajib

e. Denda menjadi harta kekayaan koperasi.

4.2.9 Pembubaran Koperasi

Pembubaran Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi dapat dilakukan berdasarkan :

1. Keputusan rapat anggota yang dihadiri oleh tiga per empat dari jumlah perwakilan anggota.
2. Keputusan pemerintah.

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan, maka rapat anggota tahunan harus mengangkat dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili didepan dan diluar pengadilan.
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memanggil pengurus, pengawas, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan.
4. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi.
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya.

6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah. Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan adalah salah satu modal utama atau motor penggerak bagi maju mundurnya perusahaan tersebut. Tanpa adanya pekerja yang mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan, maka kegiatan pekerjaan dalam oprasional perusahaan tidak akan dapat dilangsungkan. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia adalah unsur terpenting yang perlu diprioritaskan oleh pihak perusahaan.

Dalam analisis ini penulis menggunakan responden terpilih yaitu sebanyak 39 orang yang anggota koperasi dan juga sebagai karyawan di Kementerian Agama Bukittinggi. Adapun keadaan anggota yang bekerja pada perusahaan ini dan sekaligus anggota koperasi tersebut berdasarkan struktur umur responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan responden, dan berdasarkan lamanya menjadi anggota koperasi.

5.1.1. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat produktivitas seseorang untuk menghasilkan dan mengelola sesuatu tergantung pada usia. Faktor usia pada seseorang akan dapat menentukan hasil kerjanya. Secara umum pekerja yang berusia muda atau produktif memiliki kemampuan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berusia lanjut.

Pada usia 25 - 30 tahun tenaga kerja dianggap masih produktif, sedangkan pada usia 41 – 50 tahun kondisi tenaga kerja sudah sampai batas maksimal, selanjutnya pada usia 50 tahun keatas kondisi tenaga kerja sudah mulai menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan di Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi, maka responden penelitian dikelompokan berdasarkan tingkat umur seperti ditampilkan pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 : Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Umur (Tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	30-39	15	38,46
2	40-49	15	38,46
3	>50	9	23,08
Jumlah		39	100,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa 61,54 % yang berumur diatas 40 tahun keatas sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota Koperasi adalah karyawan yang sudah lama bekerja pada Kementrian Agama Bukittinggi sehingga masih dapat meningkatkan produktifitas kinerja.

5.1.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 39 orang responden yang diambil sebagai sampel penelitian ini, Pada umumnya anggota Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi adalah laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	24	61,54
2	Perempuan	15	38,46
	Jumlah	39	100,00

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jenis kelamin yang menjadi responden tertinggi adalah laki-laki sebanyak 24 orang atau 61,54 % dan perempuan sebanyak 15 orang atau 38,46 %.

5.1.3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur kualitas dari responden dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Diakui pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas dari keanggotaannya, karena dalam hal ini masih ditentukan oleh faktor lain misalnya pemahaman tentang koperasi itu sendiri. Mengingat responden merupakan karyawan, tidaklah mengherankan jika sebagian dari mereka hanya berpendidikan SLTA/Sederajat tetapi ada juga diantara beberapa responden memiliki tingkat pendidikan diatas itu untuk lebih jelas mengenai tingkat pendidikan Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No .	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentasi (%)
1	SMA Sederajat	8	20,51
2	DIII	3	7,69
3	S1	24	61,54
4	S2	4	10,26
	Jumlah	39	100,00

Sumber : *Data Olahan 2019*

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah S1 sebanyak 24 orang atau 61,54 %, kemudian SMA sederajat sebanyak 8 orang atau 20,51%,DIII sebanyak 3 orang atau 7,69% dan S2 sebanyak 4 orang atau 10,26 %.

5.1.4. Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga adalah merupakan jumlah seluruh anggota keluarga yang berada didalam tanggungan, baik itu produktif maupun tidak produktif yang segala sesuatu kebutuhannya ditanggung oleh responden. Besar kecilnya jumlah tanggungan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran responden, semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin besar pula jumlah pengeluaran. Untuk melihat responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga pada tabel 5.4.

Tabel 5.4: Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	0	7	17,95
2	1-3	27	69,23
3	4-5	5	12,82
	Jumlah	39	100,00

Sumber : *Data Olahan, 2019*

Dari tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa responden yang mempunyai tanggungan keluarga terbanyak adalah 1-3 yakni 27 orang atau 69,23% dan 4-5 orang yaitu sebanyak 5 orang atau 12,82 % kemudian responden yang tidak memiliki tanggungan yaitu jumlah paling sedikit yakni 7 orang atau 17,95 %.

Jadi sebagian besar responden memiliki tanggungan keluarga 1-3 dan 4-5 orang.

5.1.5. Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Anggota Koperasi

Para anggota sampel sudah lama menjadi anggota Koperasi sejak berdirinya Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi. Namun ada beberapa anggota sampel yang baru beberapa tahun menjadi anggota Koperasi dikarenakan baru bergabung menjadi Karyawan di Kementrian Agama Buittinggi, untuk mengetahui lamanya menjadi anggota Koperasi dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 : Responden berdasarkan Lamanya Menjadi Anggota Koperasi PNRI
Kementrian Agama Bukittinggi

No	Lamanya Menjadi Anggota Koperasi	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	<5 Tahun	1	2,56
2	5,1-10 Tahun	10	25,64
3	10,1-15 Tahun	19	48,72
4	>15 Tahun	9	23,08
	Jumlah	39	100,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak menjadi anggota koperasi yaitu diatas 10 tahun sebanyak 19 orang atau 48,72 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota koperasi adalah karyawan yang sudah lama bekerja di Kementrian Agama Bukittinggi.

5.2 Peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Koperasi Dari Tahun 2012-2017

Memberikan manfaat ekonomi koperasi kepada anggota dapat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi langsung yaitu manfaat ekonomi yang langsung diterima oleh anggota koperasi dalam bentuk manfaat harga yang menguntungkan bagi anggota serta manfaat bunga yang menguntungkan anggota, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung berupa nilai Sisa Hasil Usaha yang diterima anggota. Untuk mengetahui perubahan SHU dan rata-rata SHU yang diterima anggota perorang pertahun Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.6 : Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2012

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	24	61,54
3	500.000-999.000	12	30,77
4	>1000.000	1	2,56
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 24 orang atau 61,54%, Rp.500.000-Rp.999.000 sebanyak 12 orang atau 30,77%, <Rp.100.000 sebanyak 2 orang atau 5,13% dan yang paling sedikit >Rp.1000.000 yaitu 1 orang atau 2,56% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2012 yaitu Rp.478.205.

Tabel 5.7 : Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2013

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	19	48,72
3	500.000-999.000	10	25,64
4	>1000.000	8	20,51
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 19 orang atau 48,72%, Rp.500.000-Rp.999.000 sebanyak 10 orang atau 25,64%, >Rp.1000.000 yaitu 8 orang atau 20,51% dan yang paling sedikit <Rp.100.000 yaitu 2 orang atau 5,13% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2013 yaitu Rp.618.949.

Tabel 5.8 : Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2014

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	17	43,59
3	500.000-999.000	12	30,77
4	>1000.000	8	20,51
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 17 orang atau 43,59%, Rp.500.000-Rp.999.000 sebanyak 12 orang atau 30,77%, >Rp.1000.000 yaitu 8 orang atau 20,51% dan yang paling sedikit <Rp.100.000 yaitu 2 orang atau 5,13% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2014 yaitu Rp.710.769.

Tabel 5.9 : Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2015

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	15	38,46
3	500.000-999.000	13	33,33
4	>1000.000	9	23,08
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 15 orang atau 38,46%, Rp.500.000-Rp.999.000 sebanyak 13 orang atau 33,33%, >Rp.1000.000 yaitu 9 orang atau 23,08% dan

yang paling sedikit <Rp.100.000 yaitu 2 orang atau 5,13% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2015 yaitu Rp.763.590

Tabel 5.10 : Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2016

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	16	41,03
3	500.000-999.000	13	33,33
4	>1000.000	8	20,51
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 16 orang atau 41,03%, Rp.500.000-Rp.999.000 sebanyak 13 orang atau 33,33%, >Rp.1000.000 yaitu 8 orang atau 20,51% dan yang paling sedikit <Rp.100.000 yaitu 2 orang atau 5,13% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2016 yaitu Rp.693.718.

Tabel 5.11: Rata-rata SHU Yang diterima Responden Perorangan Pertahun di Koperasi Berdasarkan SHU Yang Diterima Tahun 2017

No	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	<100.000	2	5,13
2	100.000-499.000	13	33,33
3	500.000-999.000	13	33,33
4	>1000.000	11	28,21
Jumlah		39	100

Sumber : Data Olahan,2019

Dilihat dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa SHU yang diterima Rp.100.000-Rp.499.000 sebanyak 13 orang atau 33,33%, Rp.500.000-Rp.999.000

sebanyak 13 orang atau 33,33%, >Rp.1000.000 yaitu 11 orang atau 20,51% dan yang paling sedikit <Rp.100.000 yaitu 2 orang atau 5,13% dengan rata-rata SHU yang diterima pada tahun 2017 yaitu Rp.811.025

Adapun rata-rata SHU yang diterima oleh responden pada tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 5.12.

Tabel 5.12: Rata-rata SHU Yang diterima Responden Tahun 2012-2017

Tahun	Rata-Rata SHU (Rp)	Pertumbuhan Rata-Rata SHU (Rp)
2012	478.205	-
2013	618.949	140.744
2014	710.769	91.820
2015	763.590	52.821
2016	693.718	-69.872
2017	811.025	117.307

Sumber : Data Olahan, 2019

Dilihat dari tabel 5.12 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah SHU yang diterima responden pada setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan ikut serta dalam Koperasi PNRI Kementerian Agama Kota Bukittinggi anggota mendapatkan peningkatan pendapatan dari SHU.

5.3 Peran Koperasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi

Untuk melihat peranan Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dilihat dari kepuasan responden mengenai bentuk pelayanan yang diberikan seperti pada table 5.13.

Tabel 5.13: Rekapitulasi Pendapat Responden Terhadap Peran Koperasi PNRI Kementrian Agama Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

No	Keterangan	Ya (100%)	Kadang- Kadang (100%)	Tidak (100%)
1	Apakah koperasi memberikan dana sosial?	100	0	0
2	Apakah dalam pencairan dana memakan waktu yang lama?	0	0	100
3	Apakah terjalin kerja sama yang baik antar pengurus dan anggota?	100	0	0
4	Apakah keluarga mendapatkan beasiswa studi dari koperasi?	84,62	5,13	10,25
5	Apakah peraturan yang diterapkan koperasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku?	100	0	0

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota koperasi mendapatkan dana sosial dari yang diberikan oleh koperasi, manfaat terhadap kesejahteraan anggota koperasi yang dinikmati adalah 100% koperasi memberikan dana sosial. Pencairan dana 100% tidak sulit dan tidak memakan waktu yang lama sehingga anggota dapat terbantu jika membutuhkan dana secara tiba-tiba. 100% adanya

kerja sama yang baik antar pengurus dan anggota koperasi. Kemudian sebagian besar dari anggota koperasi mendapatkan beasiswa studi yang diberikan oleh koperasi. Dan 100% peraturan yang diterapkan koperasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya koperasi dapat membantu mensejahterkan anggota koperasi PNRI Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

5.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwasanya Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan teori Trecker (2001) menyatakan bahwa “Organisasi Koperasi telah membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah lokal dan membantu masyarakat dalam menjaga otonomi daerah.

Teori Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab III mengenai fungsi dan peran Koperasi menyebutkan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dapat disimpulkan Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota karna sebagian besar responden menjawab demikian.

Selain itu menurut penelitian yang telah dilakukan Michelle Teller tahun 2009 dengan judul "Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Dan Usaha Dan Modal Sendiri Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Riau Pekanbaru", diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan tingkat efisiensi modal usaha dan modal sendiri dapat dikatakan baik walaupun pada tahun 2005 terjadi perpotongan antara modal usaha dan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang digunakan koperasi tersebut masih banyak yang bermasalah dari modal asing. Sedangkan efisiensi penggunaan modal usaha dan modal sendiri secara keseluruhan koperasi tersebut dalam keadaan efisien.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab-bab ini penulis akan mengemukakan suatu kesimpulan tentang keadaan yang dialami Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi.

Selanjutnya akan dikemukakan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi dimasa yang akan datang.

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari data olahan 39 responden dapat disimpulkan bahwa Koperasi PNRI Kementerian Agama di Kota Bukittinggi memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Dimana dapat dilihat pada Bab V hasil rata-rata dari penerimaan SHU yang diterima anggota koperasi dari tahun 2012-2017 pada setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016.
2. Koperasi PNRI Kementerian Agama Bukittinggi mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dimana dapat dilihat bahwa 100% responden menjawab koperasi memberikan dana sosial kepada anggota bila terjadi kemalangan. 100% responden menjawab dalam proses pencairan dana tidak memakan waktu yang lama. Berdasarkan pendapat responden menjawab 100% terjalin kerja sama yang baik antar pengurus dan anggota koperasi. 84,62% responden menjawab bahwa keluarga

mendapatkan beasiswa studi dari koperasi, 5,13% responden menjawab kadang-kadang dan 10,52% responden menjawab tidak. Dan 100% responden menjawab bahwa peraturan yang diterapkan koperasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Koperasi PNRI Kementrian Agama Bukittinggi tetap menjaga koordinasi dengan anggota koperasi agar tercapai tujuan yang diinginkan.
2. Diharapkan pengurus koperasi tetap menjaga silaturahmi dan memperhatikan serta memperbaiki pelayanan terhadap anggota koperasinya.
3. Penulis banyak menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian penelitian ini diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi lebih baiknya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, 2005. *Analisa Pendapatan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Desa Mekar Jaya di Kecamatan Kampar Kiri*.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Badan Pusat Statistik. 2000. *Pendapatan atau Penghasilan*
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Hendrojogi, 2002. *Koperasi Azaz-azaz, Teori dan Praktek*. Raja Gafindo Persada, Jakarta
- Hendar, Kusnadi, 2005. *Ekonomi Koperasi Jakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Hudiyanto, 2000. *Sistem Koperasi (Ideologi dan Pengelolaannya)*, Penerbit VIIPress, Yogyakarta
- Imam Chaurmain, 1998. *Pengantar Ilmu Ekoonomi I*. Depdikud, Semarang
- Inayah, Violeta. 2010. *Peranan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Riau Dala Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Pekanbaru*.
- Jochen Ropke, 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2000. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: FEUI.
- Rambe, A. 2004. "Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara). *Tesis*. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
- Setiadi, N. J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Prenada Media. Jakarta.
- Sudarman, 2004. *Teori Ekonomi Mikro*, edisi 4, BPFE UGM, UGM

Sukirno, 2005. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT. Salemba, Jakarta

Sutrisno, Lukman, 2008. *Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa*,
<http://budirismayadi.tripot.com>, diakses pada tanggal 05 september 2018

Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*.
Jakarta : Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober
2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Pokokpokok Perkoperasian* . Sinar
Grafika, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 992, *Perkoperasian*,
(www.jevuska.com)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967, *Pokok-pokok
Perkoperasian*, (www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1967/12Tahun)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1

Wikipedia Indonesia 25/11/2010, *Koperasi*, (www.google.com)

